



**REPOSISI UNTUK  
INDONESIA YANG  
LEBIH BAIK**

**LAPORAN PUBLIK INFID**

**2009-2011**

## DAFTAR ISI

A	Ringkasan Laporan	3
B	Sekilas INFID	4
C	Visi dan Misi	5
D	Tata Kelola INFID	6
E	Program-Program INFID	
	- People-Centered Development	
	- Kemiskinan dan MDGs	
	- Democracy, Human Rights, and Security Sector Reform (DEMAND)	
	- Pengembangan dan Keberlanjutan Institusi	
F	Pembelajaran dan Langkah Ke Depan	13
G	Kesan dan Pesan Terhadap INFID	15
H	Laporan Keuangan	19
I	Lampiran	
	- Publikasi	
	- Aktivitas	
	- Badan Pengurus dan Pelaksana Harian	
	- Narasumber	

## A. RINGKASAN LAPORAN

Selama 27 tahun lebih INFID telah berupaya mendorong terwujudnya pembangunan Indonesia yang berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ini perjalanan yang cukup panjang dan kaya warna. Tentu ada banyak yang bisa dicatat dan dipelajari dari masa-masa itu untuk kemudian bisa digunakan menyusun rencana di masa depan. Meski demikian, Laporan Publik ini akan memaparkan capaian-capaian INFID dalam rentang masa yang lebih dekat, mulai 2009.

Secara ringkas laporan ini akan menerangkan jenis-jenis program utama INFID, pendekatan yang digunakan, kerja-kerja yang dijalankan dan capaian-capaian yang berhasil diraih. Program-program utama INFID tersebut adalah mempromosikan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, *People-Centered Development (PROSPECT)*, dukungan pada pengembangan kapasitas untuk mencapai tujuan pembangunan millennium *Consolidating Resources for The Achievement of The MDGs*, dan penegakan hak azasi manusia dan demokratisasi melalui reformasi sector keamanan, *Democracy, Human Rights and Security Sector Reform (DEMAND)*. Dengan kerja penuh kesungguhan, ketiga program ini menjaga INFID pada pencapaian yang mengesankan. Ditambah dengan pengembangan institusi, semua pencapaian ini menjadi landasan bagi INFID untuk terus bergerak maju.

Selain menggunakan bahan-bahan tertulis dari berbagai sumber, laporan ini dilengkapi juga dengan wawancara terhadap berbagai narasumber yang mewakili beragam kelompok yang sangat terkait dengan kerja INFID selama ini, seperti sesama Non Government Organizations (NGOs), pemerintah, lembaga donor dan akademisi.

## B. SEKILAS SEJARAH INFID

International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) lahir pada bulan Juni 1985 dengan nama INGI (Inter-NGO Conference on IGGI Matters). INFID adalah jaringan terbuka dan pluralistik yang beranggotakan berbagai Non-Government Organizations (NGOs) di Indonesia dan organisasi internasional serta individu yang memiliki komitmen terhadap pembangunan di Indonesia.

Pada awal berdirinya INFID banyak memberi masukan dan rekomendasi kritis kepada negara-negara pemberi bantuan yang tergabung dalam Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), terutama terkait dengan penyelewengan pembangunan di Indonesia. Masukan dan rekomendasi kritis tersebut dipresentasikan kepada anggota-anggota IGGI pada saat pertemuan tahunan IGGI yang biasanya berlangsung pada bulan Juni.

Untuk memperkuat advokasi INFID, lobi-lobi diperluas tidak hanya kepada negara-negara anggota IGGI melainkan juga kepada lembaga-lembaga pembangunan multilateral seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan badan-badan PBB yang menangani isu hak asasi manusia. Pilihan strategi ini didasarkan pada situasi politik saat itu yang tidak memungkinkan bagi ornop Indonesia mempengaruhi secara langsung kebijakan pemerintah Indonesia. Pendekatan tidak langsung dengan menekan negara-negara pemberi bantuan, secara bilateral maupun multilateral, diharapkan akan mendorong terlaksananya pembangunan yang lebih adil di Indonesia. Strategi ini terus diperkuat, terutama setelah IGGI dibubarkan dan digantikan oleh Consultative Group on Indonesia (CGI) pada tahun 1993. Penggantian ini, pada gilirannya, mengubah INGI menjadi INFID.

Jatuhnya rezim Suharto membawa pengaruh besar bagi INFID. Untuk pertama kalinya INFID bisa melakukan konferensi di Bali pada tahun 1999 setelah sebelumnya terpaksa menggelar konferensi di luar Indonesia, di beberapa negara Eropa dan Australia. Perubahan situasi politik Indonesia inilah menciptakan atmosfer yang memungkinkan dilakukannya diskusi kebijakan dan proyek secara terbuka di tanah air. Jika sebelumnya lobi dilakukan secara tidak langsung, setelah rezim Soeharto jatuh upaya-upaya mempengaruhi kebijakan dapat dilakukan secara langsung baik itu kepada pemerintah Indonesia maupun lembaga-lembaga internasional.

Sejak tahun 2000 INFID secara resmi membuka kantor di Jakarta dengan badan hukum berbentuk yayasan. Pembubaran CGI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 menyodorkan tantangan tersendiri bagi strategi dan format organisasi INFID. Merespons tantangan tersebut, pada tahun 2008 peserta internasional dan nasional INFID memutuskan untuk mengubah format INFID dari yayasan menjadi perkumpulan dan pada tahun 2009 anggota INFID (94 organisasi) mengadopsi serta meratifikasi tindakan hukum INFID sebagai perkumpulan. Sebagai sebuah jaringan, INFID terus berupaya untuk bisa berperan memfasilitasi anggota dan jaringannya melalui beragam aktivitas seperti seminar, rangkaian diskusi dan pelatihan-pelatihan. Semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan INFID dan anggotanya dalam mengadvokasi praktek pembangunan yang lebih baik dan manusiawi.

## C. VISI DAN MISI

### Visi

Mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya hak asasi manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global

### Misi

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik
2. Melakukan penelitian dan kajian kebijakan
3. Menggelar dialog kebijakan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marjinal berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian
4. Bekerja sama dan menggalang jejaring kerja membangun solidaritas sosial di tingkat nasional dan internasional.

## D. TATA KELOLA INFID

Sebagai pengusung dan promotor demokratisasi dalam praktek pembangunan di Indonesia, INFID mewajibkan dirinya sendiri untuk mempraktekkan pula prinsip-prinsip demokrasi di dalam tata kelola organisasinya. INFID menerjemahkan prinsip itu dengan menyusun struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel dan partisipatoris. Sidang Umum merupakan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di dalam INFID. Diadakan setiap tiga tahun sekali, Sidang Umum bertujuan memilih anggota *board* untuk periodetiga tahun, dengan komposisi minimum 40% anggota *board* adalah perempuan. Anggota *board* memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait program dan operasional serta melakukan pengawasan terhadap sekretariat secara berkala. Sidang Umum INFID juga memutuskan program selama enam tahun dan prioritas tindakan selama tiga tahun. Setiap tiga tahun program ditinjau untuk mengevaluasi prestasi dan perubahan prioritas. Guna mempertajam prioritas program, INFID. Keputusan *board* dan konferensi kemudian dilaksanakan oleh Sekretariat INFID yang dikenal pula sebagai Pelaksana Harian.

Sebelum Sidang Umum, INFID mentradisikan untuk menyelenggarakan Konferensi INFID yang isinya membahas beragam isu-isu yang tengah berkembang, untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di Sidang Umum. Guna mempertajam prioritas program, Pelaksana Harian melakukan konsultasi sub-nasional yang melibatkan anggota, pemerintah daerah, sektor usaha lokal, dan universitas dalam proses *multistakeholder*. Konsultasi sub-nasional juga dirancang untuk mengadaptasi program nasional dan internasional ke dalam konteks dan prioritas isu di tingkat lokal.

Dengan mekanisme perencanaan, pengambilan keputusan dan struktur organisasi seperti ini INFID berupaya dengan sungguh-sunggu untuk menjaga kepekaannya terhadap berbagai perkembangan terbaru, dalam berbagai level, yang diperkirakan akan berdampak secara strategis bagi pembangunan Indonesia ke depan.

## D.PROGRAM-PROGRAM

Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, walau dihadang berbagai tantangan, INFID tetap bisa menunjukkan capaian-capaian signifikan, seperti pengurangan utang luar negeri Indonesia melalui mekanisme *Debt Swap*. Berkat riset dan lobi INFID akhirnya Pemerintah Australia bersedia menghapus utang Pemerintah Indonesia untuk digunakan bagi pencapaian MDGs, khususnya penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Kepeloporan dan keterlibatan aktif INFID dalam membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendorong efektivitas bantuan dengan menggunakan instrumen *Jakarta Commitment*, telah menempatkan INFID sebagai salah satu referensi utama Pemerintah Indonesia untuk isu efektivitas bantuan (*aid effectiveness*). Pengakuan ini dibuktikan dengan keterlibatan INFID sebagai salah satu anggota *Steering Committee* (SC) Evaluasi Pelaksanaan Deklarasi Paris dan Agenda Accra untuk Aksi di Indonesia bersama Deputi Kepala Bappenas, Perwakilan Asian Development Bank (ADB) dan Perwakilan JICA (Japan International Cooperation Agency). Dengan kegigihan dan intensitas kerja yang sama, INFID juga berhasil mendorong lahirnya peta jalan pencapaian MDGs yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2010.

INFID tidak ingin terlena dengan semua pencapaian ini, karena berkeyakinan bahwa masih banyak yang perlu dan bisa disumbangkan bagi perbaikan praktek pembangunan di Indonesia. INFID harus terus meningkatkan kapasitas dan relevansinya dengan berbagai perkembangan sosial terbaru. Berdasarkan Sidang Umum yang dilakukan pada tahun 2008 dan konsultasi di enam wilayah, sejak tahun 2010 INFID melakukan perubahan fokus program. Bila sebelumnya program INFID adalah ....., maka dengan pertimbangan ..... program baru INFID adalah ***People-Centered Development (PROSPECT), Consolidating Resources for The Achievement of The MDGs, Democracy, Human Rights and Security Sector Reform (DEMAND)***. Selain ketiga program tersebut, terdapat juga program pengembangan institusi yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk mendukung kerja-kerja advokasi yang dijalankan INFID. Secara ringkas, fokus masing-masing program baru tersebut bisa diterangkan sebagai berikut:

- ***People-centred Development (PROSPECT)*** adalah program yang berfokus pada promosi pengembangan kebijakan alternatif yang menyentuh langsung ekonomi masyarakat, tindakan-tindakan masyarakat untuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, promosi transparansi dan akuntabilitas pajak atas investasi internasional dalam pembangunan daerah (diarahkan pada pengembangan *trust fund* investasi pertambangan), kampanye pajak yang adil, riset dan kampanye investasi untuk kesinambungan pembangunan dan dampak investasi terhadap ekonomi lokal.
- ***Consolidation of efforts and actions towards the achievement of MDGs within the frameworks of ESC Rights***, seperti bisa dilihat dari namanya, terkait dengan pencapaian MDGs. Jabarnya ini adalah program yang berfokus pada kampanye mempromosikan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mencapai MDGs, konsolidasi masyarakat sipil untuk mempromosikan pencapaian MDGs dan kampanye penghapusan utang tidak sah (*illegitimate debt*) guna mengurangi beban utang negara sehingga anggaran negara dapat diarahkan bagi pencapaian MDG dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.
- Sedangkan ***Consolidation of democracy and human rights (DEMAND)***, berfokus pada upaya mengawal reformasi sektor keamanan (TNI dan Polri) dan menghadapi berbagai tantangan/problem demokrasi serta pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Bagaimana ketiga program ini bisa menempatkan INFID ke posisi yang menonjol dalam pencapaiannya, akan diterangkan pada bagian berikut.

## **PEOPLE-CENTERED DEVELOPMENT (PROSPECT)**

### **(Pembangunan Berpusat pada Rakyat)**

***Tujuan utama PROSPECT memastikan agar kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Indonesia di tingkat nasional maupun daerah mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat.***

Pelantapi pasti sosok Indonesia mulai berubah. Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah dengan rata-rata pendapatan masyarakat sebesar 3.000

dolar AS per tahun. Di tengah krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan menjalar ke Eropa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil. Karena prestasi ini, Indonesia kemudian bisa “naik kelas” dengan diundang ikut ke dalam G-20, perluasan dari G-8, kelompok negara-negara paling berpengaruh secara ekonomi di dunia. Pencapaian sosial-ekonomis yang mengesankan ini ditambah dengan bergesernya Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar, semestinya mampu menyediakan peluang lebih besar bagi masyarakatnya untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan dan memudahkan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Sayangnya, capaian tersebut seperti tidak bermakna ketika mengingat Indonesia masih dililit beragam persoalan seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya. Kebijakan ekonomi pemerintah (moneter, fiskal, investasi, perdagangan dan industri kebijakan) hanya terpaku pada promosi investasi bagi pelakupasar internasional dan konglomerat nasional, sementara ekonomi rakyat hampir diabaikan. Hal ini bisa dilihat, misalnya, pada ekstraksi sumber daya alam, pasar ritel dan pasar jasa.

Kenyataan inilah yang mendorong INFID untuk menggagas program yang berfokus pada upaya terciptanya pendekatan alternatif dalam pembangunan yang disebut People-Centered Development (PROSPECT). People-Centered Development, pembangunan yang berpusat pada rakyat, kembali menjadi pemikiran utama dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons atas kenyataan dan kebijakan-kebijakan pembangunan saat ini yang mengabaikan hak-hak warga negara, merampas hak-hak rakyat atas sumber daya alam dan pembangunan, serta kebijakan yang hanya memprioritaskan pasar dengan mengabaikan kesejahteraan warga negara.

## Tujuan Program

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui PROSPECT adalah: **pertama**, mempromosikan kebijakan makroekonomi yang bertanggung jawab secara sosial, terutama di sektor investasi, perdagangan dan industri ekstraktif; **kedua**, mempromosikan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku pembangunan di tingkat lokal (CSO dan CBO) dalam memperkuat pembangunan yang berpusat pada rakyat; dan **ketiga**, mengkonsolidasikan pengembangan kapasitas *peer group* di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota madya.

## Kegiatan dan Capaian Program

Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut INFID melakukan aktivitas mulai dari riset, lobi hingga kampanye, di samping pendidikan publik yang melibatkan sesama NGOs, unsur pemerintah dan lembaga-lembaga internasional. Dalam rangkaian kegiatan tersebut INFID berhasil mencapai beberapa hal berikut:

- Mengurangi beban utang luar negeri pemerintah melalui mekanisme *debt swap* untuk digunakan bagi pencapaian beberapa target MDGs. *Debt swap* dengan Pemerintah Australia digunakan untuk mengurangi tuberkulosis.
- Membuka ruang dialog, khususnya, antara pemerintah dan NGO dalam rangka mendorong efektivitas bantuan dengan menggunakan instrumen *Jakarta Commitment*. A4DES sebagai sekretariat bersama yang bertugas menjalankan mandat *Jakarta Commitment* aktif mendorong partisipasi CSO dalam melaksanakan *Jakarta Commitment*
- Mendorong lahirnya beberapa peraturan bagi percepatan terwujudnya efektivitas, antara lain Peraturan Presiden (PP) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan merujuk pada prinsip-prinsip akuntabilitas
- INFID menjadi salah satu anggota *Steering Committee (SC)* Evaluasi Pelaksanaan Deklarasi Paris dan Agenda Accra untuk Aksi di Indonesia bersama Deputi Kepala Bappenas, perwakilan Asian Development Bank (ADB) dan perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA).
- Memastikan keterlibatan masyarakat sipil, khususnya NGO, dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat nasional setidaknya dalam 2 tahun terakhir.
- Meningkatkan kesadaran dan kapasitas NGO untuk aktif dan membuka diri bagi dialog dengan aktor-aktor pembangunan lainnya dalam rangka mendorong efektivitas pembangunan, khususnya menyangkut kepemilikan (*ownership*) dan akuntabilitas (*accountability*), melalui serangkaian diskusi, seminar dan workshop tentang efektivitas bantuan yang berlangsung di Yogyakarta dan Jakarta.
- Bersama anggota dan mitra, INFID mulai memahami secara lebih baik beragam isu terkait G-20 dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Partisipasi

anggotadan jaringanmenunjukkankesadaran bersamatentang pentingnyapengawasanmasyarakat sipilterhadapprosesdan hasilpertemuanG-20.

- Memperkuat kapasitas anggota dan jaringan INFID dalam melakukan advokasi berbasis riset melalui pelatihan riset di Bali, Makassar dan Bogor yang diikuti oleh sekitar 90 organisasi.
- Mendorong pendalaman pengetahuan anggota-anggota INFID mengenai konsep People-Centered Development dan membantu anggota maupun mitra agar aktif mengidentifikasi berbagai kendala dalam mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat

## CONSOLIDATING RESOURCES FOR THE ACHIEVEMENT OF THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

### (Konsolidasi Sumber Daya bagi Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium)

***Tujuan utama program ini adalah mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan saling terkait, kerangka kerja yang sesuai dan tindakan terpadu untuk mencapai MDGs***

Kemiskinan masih menjadi problem krusial di Indonesia. Menurut pemerintah proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari 1 dolar AS per hari sudah turun dari 20,6 persen pada tahun 1990 menjadi 5,9 persen pada tahun 2008. Namun, di sisi lain pemerintah juga mengaku masih diperlukan kerja keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan—mengacu padagariskemiskinan nasional—dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 8-10% pada tahun 2014. Diperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai lebih dari 40% jika ukuran kemiskinan yang dipakai adalah 2 dolar AS per hari. Fakta lain, disparitas pendapatan di Indonesia juga semakin besar dengan rasio gini saat ini mencapai 0,41. Pencapaian MDGs Indonesia saat ini pun masih menunjukkan hasil yang tidak merata. Di satu pihak beberapa target MDGs memang sudah tercapai tetapi di pihak lain masih banyak pula yang belum.

Dengan besaran APBN yang terus meningkat setiap tahun—Rp 1.300 triliun untuk tahun 2012—Indonesia seharusnya memiliki ruang fiskal yang besar untuk mengatasi persoalan kemiskinan, apalagi jika mengacu pada studi Bappenas (2008) yang menyebutkan bahwa untuk mencapai tiga sektor utama MDGs (pendidikan, kesehatan, air bersih serta sanitasi) hanya diperlukan biaya Rp 1.275 triliun untuk empat tahun ke depan (2011-2015), atau sekitar Rp 319 triliun per tahun. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat masih tingginya beban utang Indonesia, belum lagi jika diingat kualitas kebijakan alokasi anggaran dan penyediaan layanan kepada masyarakat miskin. Total utang Indonesia pada tahun 2011 mencapai Rp 1.804 triliun dan pada tahun 2012 diperkirakan akan mencapai Rp 1.937 triliun. Pembayaran cicilan bunga utang (belum termasuk cicilan pokok) mencapai Rp 106, 583 triliun pada tahun 2011.

Kebijakan sosial di Indonesia juga masih bersifat residual dari sisi alokasi maupun pelaksanaannya. Berdasarkan data OECD Indonesia adalah salah satu dari empat negara (bersama Laos, Kamboja dan Pakistan) dengan alokasi untuk sistem perlindungan sosial terendah.

Sesungguhnya, sudah lama INFID terlibat secara intensif dalam upaya mempromosikan pendekatan berbasis hak dalam setiap dokumen strategis pemerintah, mempromosikan pendekatan partisipatif dalam penyusunan kebijakan terutama strategi pengurangan kemiskinan, mengintegrasikan perspektif lingkungan dan gender dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Bukan itu saja, kemiskinan dan MDGs juga digunakan INFID untuk melakukan advokasi terhadap penghapusan, pengurangan dan pengalihan utang. INFID juga berusaha untuk tidak hanya berfokus pada advokasi kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan tetapi juga berupaya mempromosikan inisiatif-inisiatif dan aksi-aksi masyarakat dalam memelihara dan memajukan kondisi kehidupan mereka.

## **Tujuan Program**

Beberapa tujuan spesifik yang ingin dicapai dengan program kemiskinan dan MDGs adalah (i) mempromosikan kebijakan yang koheren untuk mencapai MDGs pada tahun 2015, (ii) mempromosikan kapasitas pemerintah lokal dalam membuat kebijakan utamanya untuk mencapai MDGs, (iii) memperkuat kampanye penghapusan utang, (iv) mempromosikan partisipasi aktif masyarakat miskin dalam proses pengurangan

kemiskinan dan pembangunan, (v) mengkonsolidasikan Ornop dalam kampanye dan berpartisipasi langsung dalam beragam aksi untuk mencapai MDGs, (vi) mendorong partisipasi aktif parlemen dalam kampanye dan aksi-aksi pencapaian MDGs.

## Capaian Program

Beragam aktivitas dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Aktivitas riset yang dilakukan diarahkan untuk memperkuat advokasi MDGs, misalnya riset tentang perbandingan alokasi pembiayaan MDGs dan pembayaran utang dalam APBN, riset tentang kelaparan di Yahukimo, riset tentang pencapaian MDGs terkait kesehatan ibu dan anak, dan sebagainya. Demikian pula dengan lobi dan kampanye yang dilakukan. Dalam kerangka ini INFID setidaknya-tidaknya telah mencapai hal-hal berikut:

- Tersusunnya peta jalan bagi pencapaian MDGs, yang merupakan salah satu desakan INFID kepada pemerintah.
- INFID sudah mulai menyiapkan agenda-agenda advokasi “Post-2015”, salah satunya dengan mengirim surat kepada salah satu staf ahli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Advokasi ini penting dilakukan mengingat PBB telah menunjuk Presiden sebagai salah satu ketua High Level Panel UN on Post-2015.
- Bersama dengan anggota dan jaringan, INFID telah menyusun Citizen Report on MDGs
- Kampanye publik terkait potensi kegagalan Indonesia dalam menurunkan tingkat kematian ibu. Kampanye ini didasarkan atas laporan Indeks Pembangunan Manusia dan fakta-fakta lapangan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka kematian ibu sangat tinggi.

## DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND SECURITY SECTOR REFORM (DEMAND)

### (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Sektor Keamanan)

***Program ini bertujuan memberi sumbangan bagi penguatan demokrasi, mempromosikan hak asasi manusia dan reformasi sektor keamanan di Indonesia***

Demokrasi di Indonesia belum berkorelasi positif dengan pembangunan dan keamanan manusia. Hak asasi manusia masih di bawah ancaman. Masyarakat di Papua, Sulawesi Tengah, NTB dan NTT misalnya—walaupun kebijakan dan program pemerintah secara tertulis mempromosikan perdamaian dan pembangunan—masih hidup di bawah ancaman dan teror.

Meskipun militer dan polisi berada di luar politik formal, pada kenyataannya kontrol sipil atas militer dan polisi masih terbatas. Militer dan polisi masih menjadi aktor independen di negeri ini, dengan sedikit kontrol dari lembaga yang dipilih secara demokratis. Di tingkat regional, dalam konflik maupun tidak, polisi semakin berperan sama dengan militer di masa lalu sebagai kekuatan represif

Pembiayaan pertahanan merupakan salah satu elemen penting bagi adanya kontrol yang demokratis terhadap militer. Pembiayaan pertahanan bukan melulu persoalan ketersediaan anggaran bagi sektor pertahanan tetapi juga, dan ini jauh lebih penting, soal memastikan bahwa satu-satunya sumber pembiayaan pertahanan berasal dari anggaran negara. Di Indonesia, masalah sistem pembiayaan pada umumnya jauh lebih penting daripada soal jumlah yang dialokasikan.

Kontrol atas sistem pembiayaan sangat kompleks dan membutuhkan perjuangan politik lebih serius. Sistem pembiayaan berkaitan dengan berbagai pihak dengan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing. Kementerian Pertahanan, misalnya, adalah institusi yang berwenang melakukan kebijakan pertahanan negara, sedangkan Markas Besar TNI memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah.

Selain persoalan pembiayaan pertahanan, Indonesia juga masih dihadapkan pada masih lemahnya kapasitas polisi untuk mendukung upaya-upaya penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Polisi merupakan salah aktor bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Kegagalan menangani persoalan korupsi dan maraknya konflik tanah membuktikan masih lemahnya kapasitas Polri. Tampilnya jenderal purnawirawan TNI dengan masa lalu sarat persoalan hak asasi manusia (HAM) ke panggung politik juga menjadi problem tersendiri bagi Indonesia dan membuktikan masih bercokolnya impunitas.

Gambaran situasi di atas setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa pelaksanaan hak sipil dan politik dihadang oleh meningkatnya peran polisi dan militer di luar fungsi kelembagaan mereka dan tampilnya jenderal yang diduga pelanggar HAM di masa lalu ke panggung politik. Di sisi lain, pelaksanaan hak ekonomi sosial budaya juga ditantang partai politik pemenang yang memprioritaskan pengembangan institusi untuk pasar.

Karena itulah INFID merasa perlu memastikan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia bisa ditegakkan di Indonesia dan bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, melalui program DEMAND.

### **Tujuan Program**

Program ini memiliki beberapa tujuan spesifik, yaitu (i) meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal agar masyarakat memiliki kontrol langsung atas penyusunan kebijakan, (ii) mempromosikan kapasitas kelompok masyarakat di tingkat lokal untuk ikut serta memantau pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya, (iii) mempromosikan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran kepolisian dan polmas, (iv) meningkatkan kapasitas anggota parlemen dalam mengakomodasi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam mengawasi operasi militer dan polisi.

### **Capaian Program**

Capaian INFID terkait program DEMAND antara lain adalah :

- Adanya pakta integritas dalam pembelian alutsista (alat utama sistem senjata)
- Mendorong adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Strategis Pertahanan
- Terintegrasikannya usulan INFID dalam Peraturan Kapolri No.8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia
- Meningkatkan kapasitas advokasi NGO di sektor reformasi keamanan melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan bersama Imparsial.

## **PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN INSTITUSI**

Sejak Forum Tingkat Tinggi tentang Efektivitas Bantuan di Accra, Ghana pada September 2008—yang melahirkan Accra Agenda for Action (AAA) dimana organisasi masyarakat sipil termasuk ornop diakui secara eksplisit sebagai pelaku pembangunan—muncul keprihatinan dan perhatian terhadap upaya pengembangan kapasitas ornop di Indonesia agar lebih mampu melaksanakan fungsi dan peran sebagai aktor pembangunan.

Terdapat kebutuhan untuk mengkonsolidasikan ornop dari tingkat nasional ke daerah dalam rangka membangun bersama kode etik dan prinsip-prinsip utama dalam operasi mereka. Ornop harus kritis, independen, dan memiliki tingkat kapasitas minimal tertentu agar mampu memberi layanan kepada masyarakat dan melakukan advokasi vis-a-vis pemerintah, parlemen, partai politik dan bisnis besar.

Kenyataan ini memacu INFID untuk lebih sigap dalam mengelola Sekretariat maupun mendorong anggota INFID menunjukkan kinerja lebih baik. Di Sekretariat INFID, manajemen sumber daya sudah makin diberdayakan melalui pembangunan kapasitas bagi *program officer* dan manajer administrasi dengan pelatihan, magang dan pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Pelaksanaan rencana, monitoring dan evaluasi, *quality control* untuk efektivitas kampanye, peningkatan kredibilitas, kualitas dan pengaruh informasi yang dihasilkan sudah disusun ulang secara kelembagaan di Sekretariat dan anggota didorong untuk lebih terlibat aktif. Pengelolaan sumber dana sudah diterapkan dalam manajemen yang efektif dan efisien sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Audit tahunan oleh auditor publik independen sudah dilaksanakan dan laporan keuangan INFID mendapat penilaian positif dari auditor publik independen.

Kendati demikian, sebagai salah satu ornop advokasi INFID masih kesulitan untuk membiayai aktivitasnya secara mandiri. Ketergantungan pada donor menjadi problem tersendiri saat ini, apalagi jumlah donor juga semakin berkurang. Negosiasi dengan pemerintah agar INFID dapat menerima dana dari badan-badan pembangunan resmi masih terus berlangsung. Terkait kondisi ini, INFID perlu memiliki program yang khusus dirancang untuk perbaikan kelembagaan demi memastikan pengembangan dan keberlanjutan INFID. Tujuan dari program ini adalah (i) memajukan kapasitas kelembagaan INFID (anggota dan staf sekretariat) dalam mendukung advokasi secara nasional dan internasional, di samping memajukan efektivitas pembangunan di tingkat

lokal;(ii) meningkatkan akuntabilitas Ornop di Indonesia melalui pengembangan piagam akuntabilitas Ornop, (iii) memajukan kapasitas anggota INFID dalam penelitian kebijakan dan penelitian untuk advokasi; dan (iv) memajukan kapasitas anggota INFID sehingga mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan program INFID. Aktivitas yang sudah dilakukan, antara lain, adalah fasilitasi anggota INFID, perubahan bentuk badan hukum INFID, penggalangan dana dan sebagainya.

## E. PEMBELAJARAN DAN LANGKAH KE DEPAN

### Pembelajaran

Selama tiga tahun terakhir, INFID menyadari besarnya tantangan yang dihadapi secara eksternal maupun internal. Mengingat begitu banyaknya kerja yang harus dilakukan, keterbatasan sumber daya manusia yang ada menjadi salah satu tantangan INFID saat ini, selain persoalan pembiayaan.

Di sisi lain, pembubaran CGI suka tidak suka mendorong INFID mencari ruang-ruang baru untuk melakukan advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia. Sosok Indonesia yang sudah menjadi negara demokrasi berpendapatan menengah juga menjadi tantangan tersendiri saat ini. Di satu sisi, masyarakat internasional menilai Indonesia telah mampu mencapai kemajuan yang signifikan di sektor sosio-politik dan ekonomi dan ini menyebabkan donor mengurangi bantuan keuangan bagi Indonesia, termasuk masyarakat sipil. Di sisi yang lain, fakta menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia masih dibelit masalah serius terkait kemiskinan, kurangnya layanan publik, kesenjangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan serta antara Jawa dan luar Jawa, serta dan konflik sosial atas nama agama, semuanya ini membutuhkan peran penguatan masyarakat sipil.

Menyusutnya bantuan dari donor, Amerika Serikat (AS) dan Eropa, karena krisis ekonomi menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat sipil mengenai pentingnya meningkatkan sumber pendanaan lain. Sejauh ini, mayoritas Ornopdi Indonesia masih menerima dana dari dua donor tersebut. Kemampuan Ornop menghimpun dana dari selain kedua donor tersebut masih layak diabaikan. Pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman ini adalah pentingnya kreativitas dan kemandirian dalam penggalangan dana untuk menghindari gangguan pada kerja-kerja organisasi.

Walaupun dihadang bermacam-macam tantangan, INFID berhasil menunjukkan capaian signifikan dalam melakukan advokasi *debt swap* kepada pemerintah Australia agar utang Indonesia dapat dipakai untuk percepatan pencapaian MDGs. Disahkannya dokumen percepatan pencapaian MDGs oleh Pemerintah adalah capaian signifikan INFID yang lain. Advokasi INFID yang mengandalkandialog dengan pemerintah dan donor serta didukung oleh jaringan internasional terbukti efektif bagi proses advokasi kepada pemerintah.

Pilihan untuk menjadikan riset sebagai basis argumen dalam melakukan advokasi juga tetap dipertahankan hingga saat ini. INFID terus melakukan riset-riset yang dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan kapasitas NGO baik di tingkat nasional maupun lokal agar dapat melakukan riset dengan baik.

## Langkah Ke Depan

Sebagai organisasi yang memiliki warisan besar, INFID tetap menyimpan kapasitas untuk menjadi salah satu Ornop terdepan dalam mengawal proses pembangunan di Indonesia. Sejarah advokasi dalam mengawal proses pembangunan itu dan jaringan luas nasional maupun internasional menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan INFID hingga saat ini. Sehingga, bagaimana mempertahankan INFID sebagai salah satu Ornop yang diperhitungkan dalam advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia dan mempertahankan INFID sebagai sebuah jaringan yang mampu mengakomodasi semua harapan anggotanya adalah sesuatu yang mutlak dilakukan.

Setidak-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan INFID ke depan. Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan INFID agar mampu menghasilkan riset-riset dan kampanye yang lebih berkualitas, diharapkan ini akan mendorong perubahan nantinya. Kedua, sejauh mana isu-isu yang diusung INFID dapat diterima dan dikenal, kemudian dikritisi serta dikembangkan oleh banyak pihak termasuk pemerintah dan Ornop lainnya. Ketiga, kiat-kiat mengatasi keterbatasan pendanaan bagi ornop seiring perubahan kondisi ekonomi politik di Indonesia.

Ketiga isu yang dipilih INFID saat ini diyakini masih relevan dengan situasi di Indonesia. Pembangunan yang berpusat pada rakyat, upaya pengurangan kemiskinan yang didukung oleh kebijakan sosial yang baik, dan meningkatkan kapasitas demokrasi serta pengarusutamaan pendekatan hak asasi manusia dalam pembangunan, masih menjadi pintu masuk bagi terwujudnya Indonesia yang lebih baik.

## F. REAKTUALISASI MELALUI REPOSISI DAN PENGUATAN KEMBALI JARINGAN

### (Kesan dan Pesan Terhadap INFID)

Warisan besar dalam mengawal proses pembangunan di Indonesia tersebut menempatkan INFID pada posisi unik. Di tengah hadirnya organisasi-organisasi baru yang terkadang memiliki kemiripan isu dengan INFID, peran dan kerja INFID ternyata masih terus dibutuhkan. Kekecewaan yang sempat terlontar atas kinerja INFID terakhir malah menunjukkan masih besarnya harapan yang disematkan kepada INFID. agar menjadi salah satu yang terdepan dengan segala dinamika dan pasang surutnya sebagai organisasi. Harapan-harapan itu mengerucut pada keinginan agar INFID menjadi lebih baik. Berikut kesan dan pesan mereka terhadap INFID :

#### **Masyarakat Sipil**

##### **Zoemrotin K. Susilo**

Saya merasa bahwa INFID mengalami kemunduran. INFID tidak lagi bekerja sebagai jaringan, evaluasi eksternal tidak pernah dilakukan dan *board* sendiri kurang memiliki kepedulian terhadap INFID. Sebagai upaya perbaikan sebaiknya INFID melakukan reposisi sehingga jelas INFID mau menjadi dan melakukan apa ke depannya.

##### **Ivan Hadar**

INFID memiliki warisan yang banyak meski dalam fase-fase yang berbeda. Dengan warisan dan kapasitas yang dimiliki, INFID harus jelas mau mengarah kemana. Visi dan misi harus *firm*. Jaringan internasional INFID juga harus kembali dihidupkan.

##### **Binny Buchori**

INFID saat ini jarang sekali muncul di media, kualitas riset dan kampanye sepertinya juga mengalami penurunan. Selain itu INFID juga mengalami masalah tata kelola dan ketiadaan *leadership* dari *board*.

Lepas dari persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, kehadiran INFID masih penting, masih dibutuhkan sebagai organisasi payung, terutama untuk ornop-ornop dalam negeri. Isu-isu internasional tetap harus disuarakan oleh INFID seperti krisis ekonomi yang melanda Eropa, ODA, dan juga menyuarakan inisiatif-inisiatif yang muncul terkait isu-isu pembangunan.

### **Septer Manufandu**

Sebagai jaringan, INFID memiliki wilayah strategis dan kapasitas untuk bermain di level internasional. Dengan demikian, INFID sebenarnya bisa memanfaatkan teman-teman jaringan yang pastinya memiliki karakter dan isu tersendiri, kemudian isu-isu strategis dan aspek-aspek krusial didalamnya dikemas dengan baik untuk kepentingan kampanye dan advokasi, baik di level nasional maupun internasional. Sayangnya, hal tersebut belum dimainkan secara optimal oleh INFID, termasuk misalnya status konsultasi INFID di PBB.

INFID juga bisa mendapatkan informasi dari teman-teman jaringan misalnya melalui penyusunan laporan rutin dari masing-masing wilayah dan riset investigasi terkait isu-isu pembangunan. Mengenai riset investigasi, sebenarnya pernah dibicarakan, namun hingga saat ini belum terealisasikan.

Ke depan INFID sebaiknya melakukan pemetaan ulang terhadap organisasi-organisasi lain yang juga melakukan hal yang mirip dengan INFID, strategi advokasi juga harus diperjelas termasuk memanfaatkan status konsultasi di PBB. INFID juga harus melakukan pemetaan jaringan dan evaluasi terhadap sistem berjaringan yang selama ini dijalankan.

### **Dian Kartikasari**

Sebenarnya terdapat capaian yang cukup signifikan dari INFID, misalnya kampanye *debt relief* yang berhasil dimana pemerintah Jerman dan Australia mau mengalihkan utang untuk program-program kesehatan terutama HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Meskipun demikian, strategi untuk isu utang harus diperbaiki. INFID juga harus memperbaiki tata kelola program, karena pada dasarnya banyak data yang dimiliki oleh INFID.

Ke depan INFID harus melakukan reposisi terutama terkait dengan penguatan substansi dari isu yang didorong, agar kampanye dan riset INFID menjadi lebih baik. INFID juga membutuhkan sosok yang mampu menggerakkan organisasi, sehingga kerja-kerja INFID ke depan dari sisi isu maupun kelembagaan menjadi lebih baik. INFID juga harus pandai mengelola jaringan nasional dan memperkuat jaringan internasional, sehingga bisa “*leading*” di level internasional.

### **Poengky Indarti**

INFID harus memperkuat jaringan internasional dan pemerintah serta membina hubungan yang lebih baik dengan partisipan. INFID juga harus segera duduk bersama dengan teman-teman lain yang bekerja di isu hak asasi manusia, untuk menggagas kerja-kerja ke depan. Kampanye-kampanye INFID juga harus ditingkatkan kualitasnya. Secara internal, INFID setidaknya membutuhkan dua wakil yang masing-masing mengawal isu dan organisasi.

Lebih spesifik, INFID bersama yang lain juga harus memainkan peran yang signifikan terkait hadirnya sosok-sosok yang bermasalah dengan hak asasi manusia, namun mulai unjuk gigi di dunia politik dan memiliki target politik tertentu.

### **Wahyu Susilo**

Isu MDGs saat ini mengalami stagnasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan baik di tingkat pemerintah ataupun Ornop, terutama setelah pemerintah menerbitkan *Roadmap* Percepatan MDGs tahun 2010. MDGs juga masih gagal mengelaborasi isu hak. Program INFID yang memiliki kemajuan menggembirakan adalah terkait isu *aid effectiveness* dan G-20 (berada di bawah PROSPECT), dimana INFID berupaya terus untuk mendorong agar Ornop diakui sebagai salah satu aktor pembangunan dan adanya “*engagement*” terkait dengan G-20.

Secara organisasi, INFID sebaiknya juga melakukan analisis yang lebih dalam terkait situasi ekonomi politik global dan nasional saat ini, termasuk dengan dibubarkannya CGI tahun 2007. Selain itu, INFID juga harus memperbaiki jaringannya di tingkat nasional maupun internasional terutama terkait isu lembaga keuangan internasional (IFIs).

## **Ishak Salim**

Kami mengenal INFID melalui pelatihan riset, dan terlibat dalam penelitian MDGs “My Development Goals”, meskipun kami bukan anggota INFID. Hasil dari pelatihan riset kemudian kami bagi kepada peneliti-peneliti muda di tempat kami.

Masa mendatang, riset-riset INFID harus diperkuat dan INFID juga telah memiliki modal terutama jaringan peneliti.

## **Adhi Widyatama**

INFID kurang mengajak teman-teman anggota jaringan dalam perencanaan program. Kesannya “mekanistik”, ada program terus diajak, meskipun program yang ditawarkan memang menarik. Ke depan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program terutama yang melibatkan anggota jaringan harus diperbaiki.

## **Lembaga Donor**

### **Kiswara Santi**

ICCO dan INFID telah saling berbagi tempat tersendiri dalam sejarah panjang kedua organisasi. Secara meyakinkan, reputasi INFID meliputi kualitas kinerja dan konsistensi keberpihakan. INFID dirasa mampu mewakili proses rekam masyarakat sipil untuk dan oleh Indonesia dalam konseptualisasi dan implementasi pembangunan, relasi masyarakat Utara dan Selatan serta konsolidasi Selatan-Selatan untuk dunia yang lebih berkeadilan.

INFID di masa depan akan dikuatkan melalui ruang kreatif yang inovatif serta strategi yang lentur namun aktual. Bersama mitra dan jaringan produktif yang solid, INFID akan senantiasa aktual dalam posisinya ditengah upaya masyarakat sipil memperjuangkan keadilan dan hak menuju keadilan dan kesejahteraan

## **Akademisi**

### **Ahmad Syafiq**

Saya terlibat dalam aktivitas INFID saat diminta menjadi salah satu narasumber dalam pelatihan metode penelitian tentang kesehatan dan gizi yang diselenggarakan INFID. INFID telah melakukan terobosan melalui kegiatan penelitian yang didasarkan atas metode yang kuat, khususnya untuk isu kesehatan dan gizi.

INFID juga telah berupaya menjadikan isu kesehatan dan gizi sebagai salah satu isu penting pembangunan. Ke depan INFID harus memperkuat riset-risetnya dan menjadikan isu kesehatan dan gizi sebagai salah satu isu prioritas.

## **Pemerintah**

### **Komara Jaya**

Saya mengenal INFID sejak lama, dengan isu utangnya dan *pro poorbudget* sebagai salah satu isu utama, ditambah dengan riset-riset yang dilakukan INFID. Saya dengar INFID saat ini juga terlibat aktif dalam isu efektivitas bantuan dengan terlibat dalam A4Desk, namun INFID seharusnya bisa lebih mengkampanyekan agenda ke depan terkait isu efektivitas bantuan ini.

Utang dalam negeri juga sebaiknya mulai dipikirkan dengan baik advokasi dan kampanyenya. Jika INFID juga tertarik dengan isu *urban governance* saya siap untuk membantu.

## **G. LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT**

# AUDIT REPORT 2009

KEP-408/KM.6/2004

Kantor Pusat:  
Sentra Kramat B-1B  
Jl. Kramat Raya No. 7-9  
Jakarta 10450  
Telp. 021-3156131  
Fax. 021-3148966



KEP-019/KM.5/2005

Kantor Cabang:  
Sunan Kalijaga No.63A  
Jakarta Selatan 12160  
Telp. 021-72792640  
021-72792650  
Fax. 021-72792620

Number: 052/EB&R-CJ/LAP-GA/III/10

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To:  
**The Executive Board**  
**INFID ASSOCIATIONS**  
Jakarta.

We have audited the accompanying financial position of **INFID Association** ("INFID") as of December 31, 2009 and 2008, and the related summary of fund and expenditure statements, and cash flows statements for the years then ended, which is expressed in Indonesian Rupiah. These Financial statements are the responsibility of the executive board. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants which require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the summary of fund and expenditure statements is free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the summary of fund and expenditure statements. It also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall summary of fund and expenditure statements presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

As disclosed in note 2.7 to the financial position, INFID has an obligation to accrue employee benefit based on government regulation and law of state about termination benefits and amount of employee benefits, gratuity and compensation benefits by Associations. INFID has not adopted the standard yet and has not set up any provision regarding employee benefits.

In our opinion, except the implication of employee benefits as explained in third paragraph, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of **INFID Association** as of December 31, 2009, the summary of fund and expenditure statements and its cash flows for the year then ended in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia. And for the year ended in December 31, 2008, except the implication of employee benefits as explained in third paragraph and the effect does not incorporate the financial statements LO Brussels as described in note 12 to the financial statements, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of **INFID Association**, the summary of fund and expenditure statements and its cash flows for the year then ended in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.

Kantor Cabang: Jl. Wastukanegara No. 5, Telp/Fax. 022-4238001, Bandung 40117  
Jl. S. Parman No. 234C, Telp/Fax. 0751-55101, Padang 25133



EkaMasni  
Bustaman  
& Rekan  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK

ii

The accompanying financial statements have been prepared assuming that INFID will continue to operate as going concern entities. INFID is a non-profit organization whose source of income only from grantors, if there is no grantor, than INFID will not able to do its activities.

This reports solely to assist you and is not to be referred to or distributed for any purpose to anyone who is not a member of management and donors.

**KAP EkaMasni, Bustaman & Rekan**  
No. KEP-019/KM.5/2005

**Dra. Eka Masni**  
Public Accountant License No. 98.1.0235

Jakarta, March 9, 2010

---

#### NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, summary of fund and expenditure statements, and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly the accompanying balance sheets and summary of fund and expenditure statements, and cash flows and their utilization are not designed for those who are not informed about Indonesian accounting principles, procedures and practices. The standards, procedures and practices applied utilized in Indonesia to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia.

---

**INFID ASSOCIATION**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**As Of December 31, 2009 and 2008**  
(Expressed in Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

ASSETS	Notes	2009	2008
<b>CURRENT ASSETS</b>			
Cash and cash equivalents	2.2, 3	1.972.380.047	2.931.498.429
Receivable to donors	4	-	786.654.948
Other receivable	5	14.133.399	33.632.799
Prepaid expenses	2.3, 6	30.000.000	120.000.000
Fixed assets	2.4, 7		
Acquisition cost		718.117.910	766.480.270
Accumulated depreciation		(718.117.910)	(766.480.270)
<b>TOTAL ASSETS</b>		<b>2.016.513.446</b>	<b>3.871.786.176</b>
<b>LIABILITIES AND NET FUND</b>			
<b>CURRENT LIABILITIES</b>			
Payable to donor	8	-	3.681.600
Other payable/temporary income	9	-	1.166.956.594
Taxes payable	2.6, 10.a	2.364.000	14.705.300
Accrued expenses	11	-	386.693.400
		<b>2.364.000</b>	<b>1.572.036.894</b>
<b>FUND</b>	12		
Initial donation		-	-
Accumulated fund		2.014.149.446	2.299.749.282
<b>Total fund</b>		<b>2.014.149.446</b>	<b>2.299.749.282</b>
<b>Total liabilities and fund</b>		<b>2.016.513.446</b>	<b>3.871.786.176</b>

The accompanying notes to financial position  
an integral part of these financial statements

**INFID ASSOCIATION**  
**STATEMENTS OF FUND AND EXPENDITURE**  
**For The Years Ended December 31, 2009 and 2008**  
(Expressed in Indonesia Rupiah, unless otherwise stated)

PROGRAM	Notes	2009	2008
<b>Fund Resources</b>			
Fund from donors	2.5, 13a	2,745,371,194	2,929,118,000
Fund from non-donors	2.5, 13b	252,623,487	228,889,979
Other donor	2.5, 13c	374,268,000	1,572,410,746
		<u>3,372,262,681</u>	<u>4,730,418,725</u>
<b>Program activities</b>			
Research and publication			
Civilian Supremacy		67,609,640	91,193,200
Debt		73,562,300	285,164,178
Poverty & MDGs		143,124,450	112,539,810
Publication, documentation and information		-	98,505,410
Information technology		-	49,365,600
Personal cost Program		125,385,925	264,611,860
		<u>409,682,315</u>	<u>901,380,058</u>
Advocacy			
Civilian Supremacy		346,677,014	103,460,539
Debt		673,813,450	270,768,549
Poverty & MDGs		289,429,101	289,521,440
Personal cost Program		430,675,190	404,778,007
		<u>1,640,594,755</u>	<u>1,068,518,535</u>
Institutional			
Institutional development, PME, Corporate MIS.		207,412,872	395,171,306
Organizational meeting		155,294,400	384,217,480
Acquisition & maintenance, HRD.		79,009,500	73,416,329
Personal cost Program		438,438,805	433,039,237
		<u>880,155,577</u>	<u>1,285,844,352</u>
Administration General Service			
INFID secretariat		668,901,665	580,695,188
		<u>668,901,665</u>	<u>580,695,188</u>
Working group & special project expenditure			
		274,715,500	1,197,762,183
		<u>3,874,049,812</u>	<u>5,034,200,316</u>
<b>Deficit current year</b>		<u>(501,787,131)</u>	<u>(303,781,591)</u>

The accompanying notes to financial position  
an integral part of these financial statements

**INFID ASSOCIATION**  
**STATEMENTS OF FUND AND EXPENDITURE - Continued**  
**For The Years Ended December 31, 2009 and 2008**  
(Expressed in Indonesia Rupiah, unless otherwise stated)

	Notes	2009	2008
Deficit current year		(501.787.131)	(303.781.591)
Returned Siemenpuu surplus of fund current period		-	-
		(501.787.131)	(303.781.591)
<b>Fund at the beginning of years</b>		<b>2.299.749.282</b>	<b>2.898.116.095</b>
Adjustment	13.	216.187.295	(294.585.222)
<b>Fund at the end of years</b>		<b>2.014.149.446</b>	<b>2.299.749.282</b>

The accompanying notes to financial position  
an integral part of these financial statements

# AUDIT REPORT 2010



Kantor Akuntan Publik  
**EkaMasni, Bustaman & Rekan**  
Akuntan Publik Terdaftar dan Konsultan Manajemen  
Izin Usaha No. : KEP-408/KM.6/2004

**Kantor Pusat :**

Gedung Sentra Kramat Blok B-18, Jl. Kramat Raya No. 7-9  
Telp. 021-3156131 • Fax. 021-3148966, Jakarta Pusat 10450  
E-mail : bustaman@indosat.net.id

Number: 074/EB&R-CJ/LAP-GAVII/2011

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To:  
**The Executive Board**  
**INFID ASSOCIATIONS**  
Jakarta

We have audited the accompanying financial position of **INFID Association** ("INFID") as of December 31, 2010 and 2009, and the related summary of fund and expenditure statements, and cash flows statements for the years then ended, which is expressed in Indonesian Rupiah. These Financial statements are the responsibility of the executive board. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants which require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the summary of fund and expenditure statements is free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the summary of fund and expenditure statements. It also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall summary of fund and expenditure statements presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

As disclosed in note 2.7 to the financial position, INFID has an obligation to accrue employee benefit based on government regulation and law of state about termination benefits and amount of employee benefits, gratuity and compensation benefits by Associations. INFID has not adopted the standard yet and has not set up any provision regarding employee benefits.


In our opinion, except the implication of employee benefits as explained in third paragraph, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of INFID Association as of December 31, 2010, the summary of fund and expenditure statements and its cash flows for the year then ended in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia. And for the year ended in December 31, 2009, except the implication of employee benefits as explained in third paragraph, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of INFID Association, the summary of fund and expenditure statements and its cash flows for the year then ended in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.

**Kantor Cabang :**

- Jl. Sunan Kalijaga No. 63 A, Kebayoran Baru  
Telp. 021-72792640, 72792650 • Fax. 021-72792620, Jakarta Selatan 12160
- Jl. Wastukencana No. 5 Telp/Fax. 022-4238001, Bandung 40117
- Jl. S. Parman No. 234 C, Telp. 0751-7055101 • Fax. 0751-7059924, Padang 25133

This reports solely to assist you and is not to be referred to or distributed for any purpose to anyone who is not a member of management and donors.

**Managing Partner**



**Hermen Bustaman, CPA**  
Public Accountant License No. 98.1.0485

Jakarta, July 26, 2011

---

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, summary of fund and expenditure statements, and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly the accompanying balance sheets and summary of fund and expenditure statements, and cash flows and their utilization are not designed for those who are not informed about Indonesian accounting principles, procedures and practices.  
The standards, procedures and practices applied utilized in Indonesia to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia.

---

**INFID ASSOCIATION**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**As Of December 31, 2010 and 2009**  
(Expressed in Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

<b>ASSETS</b>	<b>Notes</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>CURRENT ASSETS</b>			
Cash in bank	2.2, 3, 13	632.729.777	1.972.380.047
Receivable to donors	4, 11.a	45.712.550	-
Other receivable	5	670.299.068	14.133.399
Prepaid expenses	2.3	2.500.000	30.000.000
Fixed assets	2.4, 6		
Acquisition cost		677.986.910	718.117.910
Accumulated depreciation		(677.986.910)	(718.117.910)
<b>TOTAL ASSETS</b>		<b>1.351.241.395</b>	<b>2.016.513.446</b>
<b>LIABILITIES AND NET FUND</b>			
<b>CURRENT LIABILITIES</b>			
Taxes payable	2.6, 7.a	12.706.000	2.364.000
Accrued expenses	8	31.300.000	-
		44.006.000	2.364.000
<b>FUND</b>	9		
Accumulated fund		1.307.235.395	2.014.149.446
<b>Total fund</b>		<b>1.307.235.395</b>	<b>2.014.149.446</b>
<b>Total liabilities and fund</b>		<b>1.351.241.395</b>	<b>2.016.513.446</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

**INFID ASSOCIATION**  
**STATEMENTS OF FUND AND EXPENDITURE**  
**For The Years Ended Desember 31, 2010 and 2009**  
(Expressed in Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

PROGRAM	Notes	2010	2009
<b>Fund Resources</b>			
Fund from donors	2.5, 10.a	1.403.561.779	2.745.371.194
Fund from non-donors	2.5, 10.b	11.373.813	252.623.487
Other donor	2.5, 10.c	400.227.130	374.268.000
		1.815.162.722	3.372.262.681
<b>Program activities</b>			
<b>Research and Publication</b>			
Civillian Supremacy/DEMANDS		49.182.100	67.609.640
Debt campaign		5.000.000	73.562.300
Poverty & MDG's		100.237.500	143.124.450
Personal cost program		384.207.988	125.385.925
People-centred development (PROSPECT)		87.577.540	-
		626.205.128	409.682.315
<b>Advocacy/Political action</b>			
Civillian Supremacy/DEMANDS		32.609.966	346.677.014
Debt campaign		2.232.500	573.813.450
Poverty & MDG's		56.247.814	289.429.101
Personal cost program		272.288.937	430.675.190
People-centred development (PROSPECT)		87.263.980	-
		450.643.197	1.640.594.755
<b>Capacity Development</b>			
Poverty & MDG's		2.591.000	-
		2.591.000	-

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

**INFID ASSOCIATION**  
**STATEMENTS OF FUND AND EXPENDITURE - CONTINUED**

**For The Years Ended Desember 31, 2010 and 2009**

(Expressed in Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

PROGRAM	Notes	2010	2009
<b>Program activities - continued</b>			
<b>Institutional</b>			
Institutional development, PME, Corporate MIS.		107.396.700	207.412.872
Organizational meeting		34.225.200	155.294.400
Acquisition & maintenance, HRD.		19.985.400	79.009.500
Personnal cost Program		341.894.460	438.438.805
		503.501.760	880.155.577
<b>Administration General Service</b>		580.729.812	668.901.665
<b>Special Project Expenditure</b>		358.405.876	274.715.500
		2.522.076.773	3.874.049.812
<b>Deficit current year</b>		(706.914.051)	(501.787.131)
<b>Fund at the beginning of years</b>		2.014.149.445	2.299.749.282
Adjustment	9.	-	216.187.295
<b>Fund at the end of years</b>		1.307.235.395	2.014.149.445

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

# H. AUDIT REPORT 2011



Kantor Akuntan Publik  
**EkaMasni, Bustaman & Rekan**  
Akuntan Publik Terdaftar dan Konsultan Manajemen  
Izin Usaha No. : KEP-408/KM.6/2004

Kantor Pusat :  
Gedung Sentra Kramat Blok B-18, Jl. Kramat Raya No. 7-9  
Telp. 021-3156131 • Fax. 021-3148966, Jakarta Pusat 10450.  
E-mail : bustaman@indosat.net.id

i

Number: 075/EB&R-CJ/LAP-GA/12

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**To:**  
**The Executive Board**  
**INFID ASSOCIATIONS**  
Jakarta

We have audited the accompanying financial position of **INFID Association** ("INFID") as of December 31, 2011 and 2010, and the related summary of fund and expenditure statements, and cash flows statements for the years then ended, which is expressed in Indonesian Rupiah. These Financial statements are the responsibility of the executive board. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants which require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the summary of fund and expenditure statements is free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the summary of fund and expenditure statements. It also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall summary of fund and expenditure statements presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

As disclosed in note 2.7 to the financial statements, INFID has the obligation to set up provision of employee benefit based on Labour Law No. 13/2003 in regards to termination benefits and amount of employee benefits, gratuity and compensation benefits. INFID has not adopted the standard yet and has not set up any provision regarding employee benefits.

In our opinion, except the implication of employee benefits as explained in third paragraph, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of **INFID Association** as of December 31, 2011 and 2010, the summary of fund and expenditure statements and its cash flows for the years then ended in conformity with The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities.

Kantor Cabang :  
• Jl. Sunan Kalijaga No. 63 A, Kebayoran Baru  
Telp. 021-72792640, 72792650 • Fax. 021-72792620, Jakarta Selatan 12160  
• Jl. Wastukencana No. 5, Telp/Fax. 022-4238001, Bandung 40117  
• Jl. S. Parman No. 234 C, Telp. 0751-7055101 • Fax. 0751-7059924, Padang 25133

5

The accompanying financial statements have been prepared assuming that INFID will continue to operate as a going concern entities. As describe in note 11 to financial statements, INFID is a non-profit organization whose source of fund only from grantors. These conditions raise substantial doubt about INFID ability to continue as going concern entity. The executive board's strategies with regard to these matters are also describe in note 11 to financial statements. The accompanying financial statements do not include any adjustments that might result from the outcome of this uncertainty.

As disclosed in note 2.1 to the financial statements, in 2011, INFID adopted SAK ETAP (The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities) and since there are no significant differences, the financial statement as of December 31, 2010 were not restated.

This reports solely to assist you and is not to be referred to or distributed for any purpose to anyone who is not a member of management and donors.

**EkaMasni, Bustaman & Partners**  
No. KEP-408/KM.62/2004



**Hermen Bustaman, CPA**  
**Public Accountant License No. 0328**  
Jakarta, June 28, 2012

---

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, summary of fund and expenditure statements, and cash flows in accordance with Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly the accompanying balance sheets and summary of fund and expenditure statements, and cash flows and their utilization are not designed for those who are not informed about Indonesian accounting principles, procedures and practices.  
The standards, procedures and practices applied utilized in Indonesia to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia.

---

I.

**INFID ASSOCIATION**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**As Of December 31, 2011**  
**With Comparative Figures For 2010**  
(Expressed in Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

<b>ASSETS</b>	<b>Notes</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>CURRENT ASSETS</b>			
Cash & cash equivalents	2.2, 3	1.970.811.996	632.729.777
Receivable to donors		-	45.712.550
Other receivables	4	96.880.468	670.299.068
Prepaid expenses	2.3	-	2.500.000
Advance project		44.693.195	-
Fixed assets	2.4, 5		
Acquisition cost		660.248.910	677.986.910
Accumulated depreciation		(660.248.910)	(677.986.910)
<b>TOTAL ASSETS</b>		<b><u>2.112.385.659</u></b>	<b><u>1.351.241.395</u></b>
<b>LIABILITIES AND NET FUND</b>			
<b>CURRENT LIABILITIES</b>			
Other payable		380.000	-
Taxes payable	2.6, 6.a	3.651.000	12.706.000
Advance received		58.486.500	-
Accrued expenses		-	31.300.000
<b>Total current liabilities</b>		<b><u>62.517.500</u></b>	<b><u>44.006.000</u></b>
<b>FUND</b>			
Accumulated fund	7	2.049.868.159	1.307.235.395
<b>Total fund</b>		<b><u>2.049.868.159</u></b>	<b><u>1.307.235.395</u></b>
<b>Total liabilities and fund</b>		<b><u>2.112.385.659</u></b>	<b><u>1.351.241.395</u></b>

The accompanying notes to financial statements  
an integral part of these financial statements

**INFID ASSOCIATION**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL ACTIVITIES**  
**For The Year Ended December 31, 2011**  
**With Comparative Figures For 2010**  
(Expressed in Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

PROGRAM	Notes	2011	2010
<b>Fund Resources</b>			
Fund from donors	2.5, 8.a	1.484.390.436	1.403.561.779
Fund from non-donors	2.5, 8.b	6.314.203	11.373.813
Other donors	2.5, 8.c	935.602.232	400.227.130
		<u>2.426.306.871</u>	<u>1.815.162.722</u>
<b>Program activities</b>			
	2.5, 9		
<b>Research and Publication</b>			
Civillian supremacy/DEMANDS		-	49.182.100
Debt campaign		35.000	5.000.000
Poverty & MDG's		10.305.000	100.237.500
Personal cost program		334.896.357	384.207.988
People-centered development (PROSPECT)		100.699.230	87.577.540
		<u>445.935.587</u>	<u>626.205.128</u>
<b>Advocacy/Political action</b>			
Civillian Supremacy/DEMANDS		74.836.339	32.609.966
Debt campaign		-	2.232.500
Poverty & MDG's		56.702.681	56.247.814
Personal cost program		184.408.466	272.288.937
People-centered development (PROSPECT)		88.622.430	87.263.980
		<u>404.569.916</u>	<u>450.643.197</u>
<b>Capacity Development</b>			
Poverty & MDG's		-	2.591.000
People-centered development (PROSPECT)		4.985.500	-
		<u>4.985.500</u>	<u>2.591.000</u>
<b>Institutional</b>			
Institutional development, PME, Corporate MIS.		-58.694.300	107.396.700
Organizational meeting		529.000	34.225.200
Acquisition & maintenance, HRD.		17.970.000	19.985.400
Personal cost program		191.271.110	341.894.460
		<u>268.464.410</u>	<u>503.501.760</u>
<b>Administration General Service</b>			
		264.823.664	580.729.812
<b>Special Project Expenditure</b>			
		294.895.030	358.405.876
		<u>1.683.674.107</u>	<u>2.522.076.773</u>
<b>Surplus (Deficit) current year</b>		<u>742.632.764</u>	<u>(706.914.051)</u>
<b>Fund at the beginning of years</b>		<u>1.307.235.395</u>	<u>2.014.149.445</u>
<b>Fund at the end of years</b>		<u>2.049.868.159</u>	<u>1.307.235.395</u>

The accompanying notes to financial statements  
an integral part of these financial statements

# LAMPIRAN

- **Publikasi**
- **Aktivitas**
- **Badan Pengurus**
- **Badan Pelaksana Harian**
- **Narasumber**

# Lampiran 1

## Publikasi

	<p><b>MDGs as My Development Goals</b></p> <p>Penulis : Anwar Jimpe Rachman, EM Ali, Ishak Salim, Wendy Bullan</p> <p>Tahun 2010</p>
	<p><b>Keterlibatan Militer Dalam Praktek Bisnis Ilegal DiPerbatasan Indo-Malaya:</b></p> <p><b>Studi Kasus Pembalakan Liar Di Kalimantan Timur</b></p> <p>Diterbitkan : INFID bekerja sama dengan Center for East Asian Cooperation Studies (CEACos) Universitas Indonesia</p> <p>Tim peneliti : Tirta N. Mursitama, PhD (Koordinator Peneliti) Dinna Wisnu, PhD (Anggota Peneliti) Steven Y Pailah, S.H (Asisten Peneliti) Derry Aplianta, S. Sos (Asisten Peneliti) Nara Mashista, S. Sos (Asisten Peneliti)</p> <p>Tahun 2009</p>

Studi Sungai Ciliwung

PENGABAIAN PEMERINTAH TERHADAP EKSISTENSI  
PENDUDUK PINGGIR SUNGAI: Wajah Pengelolaan  
Sungai di Indonesia



Researcher:  
Siti Khoirun Nikmah

March, 2010  
**mid**

## Studi Sungai Ciliwung

### **PENGABAIAN PEMERINTAH TERHADAP EKSISTENSI PENDUDUK PINGGIR SUNGAI: Wajah Pengelolaan Sungai di Indonesia**

Peneliti :

Siti Khoirun Nikmah

**Jakarta, 2010**

Laporan Penelitian

PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI  
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pembangunan Fisik?  
Team Riset PNPM INFID



### Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pembangunan Fisik?

Peneliti :


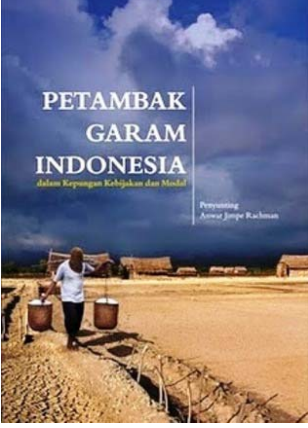

George Junus Aditjondro (koordinator)

Delima Silalahi (KSPPM Parapat)

Milita Priatna Utami (LSBH NTB)

Wendy Bullan (Cis Timor)

Tahun 2012

 <p>Apakah utang Indonesia pada Norwegia masuk kategori utang tidak sah ? Penulis: Magnus Flacké, Tin Peneliti; Magnus Flacké dan Khoirun Nikmah (INFID)</p> <p>SLUG infid</p>	<p>Apakah utang Indonesia pada Norwegia masuk kategori utang tidak sah?</p> <p>Tim Peneliti: Magnus Flacké dan Khoirun Nikmah</p> <p>Diterbitkan : SLUG - INFID</p> <p>Tahun 2009</p>
 <p>PETAMBAK GARAM INDONESIA Jalan Kepungan Kebijakan dan Modal Penyunting: Anwar Jusup Rachman</p>	<p>Petambak Garam Indonesia Dalam kepingan kebijakan dan modal</p> <p>Penulis : M Imran, Dedy Hermansyah, Sunardi Hawi, L Habibie, Rizky Amalia, Mansyur Rahim, Anwar J Rachman, Nurhady Sirimorok</p> <p>Penerbit : Ininnawa – Indonesia Berdikari – INFID</p> <p>Tahun 2011</p>
 <p>Don K. Marut</p> <p>CAN INDONESIA EXIT FROM AID?</p> <p>infid</p>	<p>Can Indonesia Exit from Aid?</p> <p>Penulis : Don K. Marut,</p> <p>Tahun 2011</p>

## Lampiran 2

### Aktivitas Program

#### Penelitian

No	Penelitian	Keterangan
1	Pencapaian MDGs di Perbatasan Kalimantan Timur	Riset ini dilakukan bekerjasama dengan PADI Indonesia pada tahun 2009. Substansi hasil riset telah disampaikan kepada pemerintah khususnya Departemen Pertahanan dan TNI
2	Ilegal Militer di Perbatasan Indomalaya	Riset ini dilakukan bekerja sama dengan CEACos Universitas Indonesia pada tahun 2009. Substansi hasil riset telah disampaikan kepada pemerintah khususnya Departemen Pertahanan dan TNI
3	Pengambilalihan Bisnis Militer	Penelitian ini dilakukan atas permintaan jaringan reformasi sektor keamanan, mengingat pada akhir Oktober 2009 merupakan batas akhir pengalihan bisnis militer.
4	Anggaran Pertahanan dan Pemerintah Lokal	Penelitian ini secara khusus menyoroti alokasi anggaran TNI dan kepolisian dalam APBD.
5	Perpolisian Masyarakat	Penelitian ini bertujuan menguji konsep perpolisian masyarakat dan praktek perpolisian masyarakat di beberapa daerah.
6	Working Paper; Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat	Working Paper ini disusun bersama oleh INFID dan jaringan Reformasi Sektor Keamanan. Melalui bantuan Human Right First, working paper ini telah disampaikan kepada pemerintah baru dan parlemen AS pada tahun 2009.
7	Utang Bilateral; Norwegia, Australia dan Jerman	Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat advokasi penghapusan utang tidak sah ( <i>illegitimate debt</i> ) dan penggunaan mekanisme <i>debt swap</i>
8	Reformasi Kebijakan Lembaga Keuangan Internasional	Penelitian ini digunakan sebagai bahan konsultasi dengan IMF bersama Ornop yang lain
9	Utang ADB di sektor Pendidikan, Infrastruktur,	Penelitian ini dilakukan untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam "People Tribunal on ADB" pada tahun 2009,

No	Penelitian	Keterangan
	Lingkungan dan sebagainya	bersamaan dengan Pertemuan Tahunan ADB
10	Analisa Audit BPK, KPK, dan BPKP terkait Utang	Penelitian ini merupakan analisis terhadap laporan BPK dan KPK terhadap perjanjian utang
11	Paradigma Pembangunan Alternatif	
12	Negara dan Kedaulatan	
13	Praktik-Praktik Ekonomi Komunitas	
14	Krisis Ekonomi Global; Kebijakan Pemerintah dan Dampak-dampaknya	Hasil penelitian ini dipresentasikan dalam pertemuan UN Conference di New York
16	Tanggung Jawab Sosial PT INCO	Tujuan umum penelitian adalah 1) Mengkaji peranan perusahaan, dalam hal ini PT International Nickel Indonesia, bagi perekonomian Indonesia sesuai dengan panduan OECD; 2) Mengkaji peranan penanaman modal PT INCO bagi pengembangan kapasitas ekonomi rakyat terutama kontribusi PT Inco bagi kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah
17	Ketangguhan Rakyat dalam Membangun Perekonomiannya	Dilaksanakan pada September – Desember 2011. Penelitian dilaksanakan di dua kabupaten Kota yaitu di Malang, Jawa Timur dan di Kota Makassar. Hasil temuan penelitian menunjukkan masyarakat memiliki inisiatif dalam mengembangkan perekonomiannya, namun inisiatif ini mengalami hambatan berupa kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada pelaku ekonomi kecil. Adapun kebijakan tersebut meliputi perlindungan ekonomi kecil dari persaingan dengan pelaku ekonomi besar dan bantuan permodalan yang tidak disertai pendampingan ekonomi
18	Pangan dan Perubahan Iklim	Penelitian dilaksanakan di dua kabupaten yaitu di Tompobulu (Sulawesi Selatan) dan Malang (Jawa Timur). Hasil penelitian memberikan gambaran ketangguhan petani

No	Penelitian	Keterangan
		dalam menyediakan pangan melalui sistem irigasi dan metode pertanian, sementara di Malang adalah perjuangan petani dalam mendapatkan lahan atas penguasaan lahan oleh PT Perhutani
19	Perbandingan Alokasi Anggaran untuk Pencapaian MDGs dan Pembayaran Utang	
20	Kelaparan di Yahukimo	Riset tentang Kelaparan di Yahukimo, dilakukan dari Bulan Oktober-Desember. Riset ini merupakan kerja sama antara Fokker LSM Papua dengan INFID, untuk mengungkap problem bencana kelaparan di Yahukimo-Papua. Riset ini merupakan bagian dari advokasi pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya dan komitmen negara dalam pencapaian MDG
21	Pencapaian MDGs untuk Goal ke 4 dan 5 yaitu kesehatan ibu dan anak	Penelitian dilaksanakan di dua kabupaten yaitu Malang, Jawa Timur bekerja sama dengan Yayasan Rumpun Perempuan (Peneliti: Nina Hendarwati, peneliti Yayasan Rumpun Malang) dan di Lebak, Banten bekerja sama dengan Baist (Banten Institute for Transformation) dengan peneliti Nisaillah (peneliti Baist)
22	Citizen Report on MDGs	Secara garis besar temuan dalam Citizen Report adalah secara umum Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam pencapaian MDGs seperti <i>goal</i> pertama mengenai kemiskinan karena kajian masyarakat sipil menunjukkan kebijakan pemerintah belum secara signifikan menurunkan angka kemiskinan, <i>goal</i> keenam yaitu eksploitasi sumber daya alam dan laju deforestasi yang terus meningkat, sanitasi yang belum tertangani dengan baik dan <i>goal</i> kelima masih tingginya angka kematian ibu melahirkan.

## Seminar dan Workshop

No	Seminar dan Workshop	Keterangan
1	Kelaparan di Yahukimo	Diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2009
2	Rembug Rakyat Tapal Kuda Dalam Menyikapi Konflik Agraria Dan Perubahan Iklim	Diselenggarakan pada tanggal 8-10 Desember 2009
3	Prospek Ekonomi Indonesia sebagai Anggota G-20 dan Dampaknya bagi Ekonomi	Diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2010
4	Diskusi Publik “Indonesia, G-20 dan Komitmen Pemberantasan Korupsi”	Diselenggarakan pada tanggal 30 November 2010
5	Diskusi Publik “Indonesia dan Implementasi Agenda Pembangunan Pasca Pertemuan Puncak G-20 di Seoul”	Diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2010
6	Open Forum on CSOs Development Effectiveness	Diselenggarakan pada tanggal 3-5 Mei 2010
7	CSOs Role in A4DES and Development Effectiveness	Diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2010
8	Development Effectiveness for CSOs in Indonesia	Diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2010
9	Pembiayaan PNPM Mandiri	Diselenggarakan pada tanggal 1 November 2011
10	Workshop Harmonisasi Temuan dan Rekomendasi Studi-Studi PNPM	Diselenggarakan pada tanggal 4 Oktober 2011






## Lobi dan Kampanye

No	Aktivitas	Keterangan
1	Lobi terhadap Pemerintah Australia dan Indonesia, terkait Debt Swap	INFID berhasil mendorong pemerintah untuk secara aktif menggunakan mekanisme <i>debt swap</i> bagi

		tercapainya beberapa target MDGs misalnya <i>debt swap</i> dengan pemerintah Australia untuk pemberantasan tuberkulosis dan dengan pemerintah Jerman untuk menanganituberkulosis, HIV/AIDS dan malaria.
2	<p>Aid Effectiveness</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seminar dan Workshop soal Aid Effectiveness, seperti <i>Open Forum on CSO Development Effectiveness di Yogyakarta pada bulan Mei 2010, Development Effectiveness for CSOs in Indonesia, dialogue on achieving the Jakarta Commitment agenda</i> dan beragam seminar serta workshp lainnya termasuk persiapan untuk HLF-4 di Busan</li> <li>- Menghadiri High Level Forum-4 on Aid Effectiveness di Busan tahun 2011</li> <li>- Advokasi Program PNPM Mandiri dalam kerangka efektivitas bantuan</li> </ul>	<p>Sejak tahun 2010, INFID telah menjadi anggota Steering Committee for the Evaluation of the Implementation of the Paris Declaration and Accra Agenda for Action in Indonesia bersama dengan Deputi Kepala Bappenas, perwakilan ADB dan JICA.</p> <p>INFID kemudian berupaya mendorong adanya kemajuan dalam Efektivitas bantuan terutama dalam kerangka pelaksanaan Jakarta Commitment melalui A4DES (Aid for Development Effectiveness Secretariat), di mana salah satu fungsi A4DES adalah memfasilitasi agar system yang mendukung efektivitas bantuan bisa berjalan, termasuk mendorong partisipasi CSO. INFID bersama A4DES beberapa kali mengadakan sosialisasi mengenai <i>Jakarta Commitment</i> di berbagai daerah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah <i>sharing</i> pengetahuan mengenai komitmen-komitmen yang ada dalam mendorong pentingnya efektivitas bantuan untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>Advokasi Program PNPM diarahkan dalam kerangka efektivitas bantuan, dimana saat ini INFID telah meminta kepada Pemerintah dan Bank Dunia untuk memperbaiki desain dan pelaksanaan program PNPM.</p>
3	<p>G-20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seminar dan Workshop terkait</li> </ul>	<p>Saat ini INFID bersama dengan Ornop-Ornop yang lain telah memiliki kertas posisi terkait keterlibatan</p>

	<p>G-20, seperti <i>Indonesia and the Implementation of the Post-Seoul Summit G20 Development Agenda, Implementasi Komitmen-Komitmen Indonesia di G20 dan Perjuangan Kepentingan Nasional Pembangunan Indonesia di G20, Workshop membangun strategi CSOs Indonesia berkaitan dengan G20, dialog dengan media dan sebagainya</i></p>	<p>Indonesia dalam G-20. Kertas posisi tersebut berfokus pada pembahasan enam isu yaitu Human Resources Development, Food Security, Rural Infrastructure, Financial Inclusion, Climate Change, Transparency and Accountability</p>
<p><b>4</b></p>	<p>Percepatan Pencapaian MDGs dan Post 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kampanye media untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs</li> <li>- Lobi kepada DPR (komisi X dan XI) terkait pencapaian MDGs di sektor pendidikan dan kesehatan</li> <li>- Diskusi mengenai Post 2015 dan Sustainable Development Goals yang dibahas di Rio+20</li> </ul>	<p>Saat ini, INFID berhasil mendorong pemerintah untuk membuat peta jalan percepatan pencapaian MDGs yang disusun pada tahun 2010. Namun, monitoring terhadap implementasi peta jalan tersebut belum dilakukan secara maksimal, terutama terkait dengan beberapa target MDGs yang capaiannya masih jauh dari harapan seperti kematian ibu dan anak.</p>

**Badan Pengurus :**

 <p>Danang Widoyoko</p>	 <p>Antarini Pratiwi Arna</p>	 <p>Farah Sofa</p>	 <p>Septer Manufandu</p>
 <p>Suryati Simanjuntak</p>	 <p>Faisal Hadi</p>	 <p>Sartiah Yusran</p>	 <p>Josef Widyatmadja</p>
 <p>Titus Odong Kusumajati</p>			

**Pelaksana Harian :**



Sugeng Bahagijo



Nawawi Bahrudin



Siti Khoirun Ni'mah



Sri Sumarni



Misnawati



Florence



Suwarno Joyomenggolo



Jeckson Robinson

 <p data-bbox="288 667 405 703">Sabarno</p>	 <p data-bbox="620 656 740 692">Wasiton</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## Narasumber

1. Zoemrotin K Susilo
2. Ivan Hadar (TNP2K-AUSAID)
3. Binny Buchory
4. Wahyu Susilo (Migrant Care)
5. Poengky Indarti (Direktur Imparsial)
6. Dian Kartikasari (Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia)
7. Septer Manufandu (Anggota Board INFID-FOKKER Papua)
8. Ishak Salim (Perkumpulan Ininawa, Makasar)
9. Adhi Widyatama (Yayasan Cakrawala Timur, Surabaya, Indonesia)
10. Kiswara Santi (Program Manager ICCO)
11. Ahmad Syafiq (Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia)
12. Komara Jaya (BAPPENAS dan Pengajar di Pusat Kajian Perkotaan Universitas Indonesia)